PENGARUH INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER, PENGELUARAN PERKAPITA PEREMPUAN, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA LAKI-LAKI TERHADAP KETIMPANGAN GENDER DI KALIMANTAN BARAT

TESIS

Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Ekonomi Pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Universitas Tanjungpura

SUKAWATI
NIM. B2052232007

PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender, Pengeluaran Perkapita Perempuan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki Terhadap Ketimpangan Gender Di Kalimantan Barat

Ini diajukan oleh :

Nama	:	Sukawati
NIM	:	B2052232007
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Tanggal Ujian	:	24 Juli 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Utama	Dr. Rosyadi, S.E., M.Si. NIP 19650921 199303 1 001		
Pembimbing Pendamping	Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. NIP 19720607 199803 2 001		
Ketua Penguji	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. NIP 19620525 198703 1 002		
Anggota Penguji	Dr. Hj. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si. NIP 19621120 198903 2 003		

Pontianak, 8 Sept 2025
Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si.
NIP 19720607 199803 2 001

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Nama	:	Sukawati
NIM	:	B2052232005
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul proposal	:	Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender, Pengeluaran Perkapita Perempuan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki Terhadap Ketimpangan Gender Di Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, September 2025



Sukawati

NIM. B2052232007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	:	Sukawati
NIM	:	B2052232007
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender, Pengeluaran Perkapita Perempuan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki Terhadap Ketimpangan Gender Di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, September 2025



Sukawati

NIM. B2052232007

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa kasih sayang dan pertolongan-Nya, mustahil karya sederhana ini dapat tersusun hingga tuntas. Semoga segala amal, usaha, dan niat yang terhimpun dalam proses penyusunan tesis ini senantiasa memperoleh ridha serta balasan yang berlipat ganda dari-Nya.

Tesis yang berjudul "**Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender, Pengeluaran Perkapita Perempuan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki terhadap Ketimpangan Gender di Kalimantan Barat**" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Barat.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntaskan studi ini.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, atas arahan dan bimbingan yang berharga selama penulis menempuh studi.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, atas segala dukungan akademik maupun administratif yang sangat membantu kelancaran studi penulis.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan pembimbing II, atas dorongan, motivasi, dan arahan yang berharga dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. Rosyadi, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, dukungan, dan arahan tulus yang senantiasa memberikan inspirasi serta motivasi hingga tesis ini terselesaikan.
6. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si., dan Ibu Dr. Hj. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji I dan II, atas kritik, saran, serta masukan konstruktif yang memperkaya dan menyempurnakan penelitian ini.
7. Pengelola dan staf Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, atas bantuan administratif yang sangat mendukung kelancaran studi.
8. Seluruh dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, atas ilmu, masukan, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses pembelajaran.
9. Bapak Innosensius Dwi Putera selaku suami atas doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan tanpa pamrih yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis.
10. Orang tua tercinta, Bapak Alm. Liau Tek Fong & Ibu Tjan Tjui Fa selaku atas doa, perhatian, dan dukungan yang tiada henti.
11. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi angkatan XXXII, atas kebersamaan dan semangat dalam mendorong terselesaikannya studi ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun teknis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi penelitian berikutnya.

Pontianak, September 2025

Penulis

Sukawati

PENGARUH INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER, PENGELUARAN PERKAPITA PEREMPUAN, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA LAKI-LAKI TERHADAP KETIMPANGAN GENDER DI KALIMANTAN BARAT

Sukawati

b2052232007@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pengeluaran Per Kapita Perempuan (PPP), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (TPAKL) terhadap Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019–2023. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode regresi data panel dan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IDG dan PPP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IKG, yang berarti peningkatan pemberdayaan dan daya beli perempuan mampu menurunkan ketimpangan gender secara konsisten. Sebaliknya, TPAKL tidak berpengaruh signifikan terhadap IKG, mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi kerja laki-laki tidak secara otomatis mengurangi kesenjangan gender tanpa disertai peningkatan kualitas dan partisipasi kerja perempuan. Temuan ini mempertegas pentingnya kebijakan pembangunan berbasis gender yang tidak hanya berfokus pada kuantitas partisipasi tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas, akses sektor formal, dan perlindungan tenaga kerja perempuan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan perlunya integrasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kemandirian ekonomi perempuan melalui program pelatihan dan pembiayaan inklusif, serta penguatan sistem monitoring berbasis data gender. Pendekatan kolaboratif lintas sektor diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Indeks Ketimpangan Gender, Pemberdayaan Gender, Pengeluaran Perkapita, Partisipasi Angkatan Kerja

THE INFLUENCE OF THE GENDER EMPOWERMENT INDEX, FEMALE PER CAPITA EXPENDITURE, AND MALE LABOR FORCE PARTICIPATION RATE ON GENDER INEQUALITY IN WEST KALIMANTAN

Sukawati

b2052232007@student.untan.ac.id

ABSTRAC

This study aims to analyze the influence of the Gender Empowerment Index (IDG), Women's Per Capita Expenditure (PPP), and Male Labor Force Participation Rate (TPAKL) on the Gender Inequality Index (GI) in 14 districts/cities of West Kalimantan Province during the 2019–2023 period. The quantitative approach was used by the panel data regression method and the selection of the best model through the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. Secondary data was obtained from the Central Statistics Agency.

The results of the study show that IDG and PPP have a negative and significant effect on IKG, which means that increasing women's empowerment and purchasing power can consistently reduce gender inequality. In contrast, TPAKL has no significant effect on IKG, indicating that high male labor participation does not automatically reduce the gender gap without an improvement in the quality and labor participation of women. These findings underscore the importance of gender-based development policies that focus not only on the quantity of labour participation, but also on improving quality, access to the formal sector, and protecting women's labour.

The policy implications of this study emphasize the need to integrate gender mainstreaming in regional development planning, increase women's economic independence through inclusive training and financing programs, and strengthen gender data-based monitoring systems. A cross-sectoral collaborative approach is expected to create a more inclusive, equitable, and sustainable development ecosystem in West Kalimantan..

Keywords**:** *Gender Inequality Index, Gender Empowerment, Per Capita Expenditure, Labor Force Participation*

RINGKASAN

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah ketimpangan gender di Provinsi Kalimantan Barat, urgensi penelitian, dan kesenjangan kajian sebelumnya. Ditekankan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pengeluaran Per Kapita Perempuan (PPP), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (TPAKL) berpotensi memengaruhi Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori terkait gender dan ketimpangan gender, termasuk konsep IKG, IDG, PPP, dan TPAKL. Dibahas teori Human Capital, Gender and Development, dan kerangka Longwe sebagai acuan analisis. Selain itu, dimuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang memperlihatkan hubungan indikator pemberdayaan dan partisipasi kerja terhadap kesetaraan gender.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian kuantitatif dengan metode regresi data panel. Data sekunder bersumber dari BPS 2019–2023 untuk 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Model terbaik dipilih melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Bab ini memuat definisi operasional variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil analisis statistik deskriptif, pengujian model, dan estimasi regresi. Ditemukan bahwa IDG dan PPP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IKG, sedangkan TPAKL tidak signifikan. Pembahasan mengaitkan hasil ini dengan teori dan temuan empiris sebelumnya, menekankan bahwa kualitas partisipasi kerja perempuan, akses sektor formal, dan perlindungan tenaga kerja lebih menentukan pengurangan ketimpangan gender daripada sekadar partisipasi kerja laki-laki.

Bab V Penutup

Kesimpulan merangkum temuan utama, yaitu peran signifikan IDG dan PPP dalam menurunkan IKG, serta ketidaksignifikanan TPAKL. Saran diberikan untuk penguatan kebijakan berbasis gender, peningkatan kemandirian ekonomi

perempuan, transformasi partisipasi kerja menjadi lebih berkualitas, penguatan sistem monitoring, dan kolaborasi multipihak.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TESIS ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRAC ..... **vii**
RINGKASAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 18
1.2.1 Pernyataan Masalah 18
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 19
1.3 Tujuan Penelitian 19
1.4 Kontribusi Penelitian 19
1.4.1 Kontribusi Teoritis 19
1.4.2 Kontribusi Praktis 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**
2.1 Tinjauan Literatur 21
2.1.1 Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) 21
2.1.2 Teori Gender Longwe 22
2.1.3 Kesetaraan Gender 25
2.2 Kajian Empiris 27
2.2.1 Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Indeks Ketimpangan Gender 28
2.2.2 Pengaruh Pengeluaran Perkapita Perempuan terhadap Indeks Ketimpangan Gender 30
2.2.3 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki terhadap Indeks Ketimpangan Gender 32
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 34
2.3.1 Kerangka Konseptual 34
2.3.2 Hipotesis Penelitian 34
BAB III METODE PENELITIAN **35**
3.1 Bentuk Penelitian 35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 35
3.3 Jenis dan Sumber Data 35
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 36

3.5 Metode dan Alat Analisis 37
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 37
3.5.2 Regresi Linier Berganda 37
3.5.3 Pengujian Hipotesis 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 39
4.1 Hasil Penelitian 39
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 39
4.1.2 Hasil Uji Regresi Data Panel 41
4.1.3 Pengujian Hipotesis 45
4.2 Pembahasan 48
4.2.1 Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Indeks Ketimpangan Gender 48
4.2.2 Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Perempuan terhadap Indeks Ketimpangan Gender 51
4.2.3 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan terhadap Indeks Ketimpangan Gender 53
BAB V PENUTUP 56
5.1 Kesimpulan 56
5.2 Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 4
Tabel 1.2 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 8
Tabel 1.3 Pengeluaran Per Kapita Perempuan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)..... 12
Tabel 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Persen)..... 14
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Piramida Konsep Kesetaraan Gender Sara Longwe..... 23
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang sistematis, berkelanjutan, dan multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Inti dari pembangunan terletak pada upaya sadar untuk mendorong transformasi ke arah yang lebih baik, dengan tujuan utama menciptakan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lestari dkk., 2021). Dalam konteks nasional, pembangunan ekonomi daerah menjadi isu strategis yang relevan bagi wilayah tertinggal, berkembang, maupun maju. Meskipun pendekatan dan karakteristik tiap daerah berbeda, fokus utamanya tetap serupa yaitu memperkuat kapasitas ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan (Prayogo & Hasmarini, 2022).

Pembangunan ekonomi daerah menuntut optimalisasi potensi sumber daya lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan daya saing wilayah. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, prinsip inklusivitas dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk menjamin akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Pendekatan pembangunan yang inklusif bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan membuka peluang yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan tanpa diskriminasi (Rahmawati & Hidayah, 2020).

Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah terletak pada kurangnya penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada kekhasan lokal (*endogenous development*), yakni pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah itu sendiri dalam proses pembangunan, guna menciptakan peluang kerja baru dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi (Hidayat dkk., 2017).

Meski demikian, orientasi pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi belumlah memadai. Distribusi hasil pembangunan yang merata serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan

merupakan prasyarat penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan inklusif. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah ketimpangan gender, yang masih menjadi persoalan struktural di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Hayya dkk., 2025). Ketimpangan ini tercermin dari masih terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap, dengan tetap menempatkan prinsip keadilan dan stabilitas sebagai landasan utama (Jahril, 2024).

Secara konseptual, gender merujuk pada konstruksi sosial dan budaya mengenai peran, hak, dan tanggung jawab yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan, yang bersifat dinamis dan kontekstual (KPP, 2004). Ketimpangan gender terjadi ketika perempuan dan laki-laki tidak memiliki peluang yang setara untuk berpartisipasi maupun menikmati manfaat dari pembangunan (BPS, 2020). Ketimpangan gender mencerminkan kesenjangan dalam pembangunan akibar adanya ketimpangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan (Septiawan & Wijaya, 2021). Ketidaksetaraan ini berdampak langsung pada terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan politik, sehingga menghambat optimalisasi potensi pembangunan (Klasen, 2006).

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah kini semakin diakui sebagai komponen strategis dalam mendorong tercapainya pembangunan yang inklusif. Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan politik tidak hanya memperkuat fondasi pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Faridatussalam dkk., 2023). Kesetaraan gender bukan sekadar representasi dari prinsip keadilan sosial, melainkan juga merupakan pilar utama bagi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Kesetaraan tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena memastikan bahwa hasil pembangunan dapat diakses dan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya pihak yang terpinggirkan (Mulasari, 2015).

Konsep kesetaraan gender mencerminkan pengakuan atas hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam seluruh dimensi kehidupan, serta untuk memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata (Sulistyowati, 2021). Kesetaraan gender juga diakui sebagai salah satu pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya dalam Tujuan Kelima, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan (Sapriyadi dkk., 2022). Dalam kerangka SDGs, prinsip "*No One Left Behind*" menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali memperoleh akses yang setara terhadap hasil pembangunan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan (Bappenas, 2017). Namun, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses kebutuhan dasar tersebut masih menjadi tantangan yang signifikan. Menurut laporan *United Nation Development Programme (UNDP) (2015)*, pengurangan ketimpangan gender dan peningkatan kesetaraan merupakan komponen esensial dari agenda pembangunan global yang tercermin dalam 17 tujuan SDGs (Adika & Rahmawati, 2021). Tujuan dan target tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan bagi setiap negara (Leal Filho dkk., 2023).

Perempuan seringkali dihadapkan pada tantangan ganda, bahkan menjalankan tiga peran sekaligus yakni peran reproduktif, produktif, dan sosial yang dikenal dengan istilah triple burden (Mosser, 1993 dalam Pasaribu, 2018). Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada keadilan gender sebagai strategi utama. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan, pembangunan dapat diwujudkan secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat (Mulasari, 2015).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. IKG dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dari tiga komponen utama, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, serta kontribusi perempuan terhadap

pendapatan (Salsabila & Hendrawan, 2021). Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mendekati angka 100 menunjukkan bahwa kesetaraan gender telah tercapai. Namun demikian, capaian tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar kesetaraan gender tersebut benar-benar mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduk (Nazmi & Jamal, 2018).

Tabel 1.1
Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	0,535	0,531	0,474	0,413	0,487
Bengkayang	0,533	0,524	0,459	0,445	0,432
Landak	0,558	0,532	0,540	0,521	0,524
Mempawah	0,567	0,570	0,546	0,567	0,555
Sanggau	0,580	0,581	0,554	0,563	0,541
Ketapang	0,671	0,674	0,605	0,642	0,602
Sintang	0,612	0,592	0,587	0,585	0,591
Kapuas Hulu	0,620	0,586	0,619	0,574	0,498
Sekadau	0,675	0,668	0,676	0,659	0,661
Melawi	0,603	0,603	0,594	0,563	0,561
Kayong Utara	0,856	0,853	0,859	0,855	0,841
Kubu Raya	0,544	0,526	0,541	0,515	0,524
Kota Pontianak	0,314	0,454	0,425	0,339	0,286
Kota Singkawang	0,327	0,321	0,354	0,321	0,372
Kalimantan Barat	0,566	0,558	0,547	0,522	0,519

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Berdarkan Tabel 1.1, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Barat yang mengalami penurunan konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Nilai IKG provinsi turun dari 0,566 pada 2019 menjadi 0,519 pada 2023, mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya mengurangi ketimpangan gender. Kota Pontianak mencatat penurunan signifikan, dari 0,314 pada 2019 menjadi 0,286 pada 2023, yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender di kota ini sangat rendah. Sebaliknya, Kota Singkawang menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan nilai IKG pada 2023 menjadi 0,372, dari 0,327 pada 2019, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten lainnya. Kabupaten Kayong Utara memiliki IKG yang sangat tinggi, yaitu 0,856 pada 2019 dan 0,841 pada 2023, meskipun ada

penurunan kecil yang menunjukkan adanya ketimpangan gender yang signifikan. Sementara itu, Kabupaten Sekadau juga menunjukkan angka yang relatif tinggi, dengan fluktuasi antara 0,675 pada 2019 dan 0,661 pada 2023. Beberapa kabupaten, seperti Sambas, Kapuas Hulu, dan Melawi, menunjukkan penurunan stabil dalam IKG, dengan Sambas mencapai 0,487 pada 2023, Kapuas Hulu turun menjadi 0,498, dan Melawi menurun menjadi 0,561 pada 2023. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar daerah mengalami penurunan IKG, beberapa kabupaten, terutama Kayong Utara dan Sekadau, masih memerlukan perhatian lebih dalam mengatasi ketimpangan gender.

Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan kesetaraan gender selama lima tahun terakhir. Nilai indeks yang semakin mendekati angka 1 menandakan tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi, sementara nilai yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan gender yang lebih besar. Secara bertahap, IKG di Kalimantan Barat turun dari 0,566 pada 2019 menjadi 0,519 pada 2023, yang mengindikasikan perbaikan dalam pengurangan kesenjangan gender. Penurunan terbesar terjadi antara tahun 2021 hingga 2022, dengan selisih 0,025 poin (dari 0,547 menjadi 0,522), yang kemungkinan besar disebabkan oleh keberhasilan berbagai kebijakan dan inisiatif yang diterapkan di daerah tersebut. Meskipun tren penurunan cukup konsisten, laju kemajuannya tergolong lambat, terutama pada periode 2022 hingga 2023, dengan penurunan hanya sebesar 0,003 poin. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mencapai kesetaraan gender masih berlangsung, meskipun ketimpangan masih relatif besar, mengingat IKG Kalimantan Barat pada 2023 masih berada pada angka 0,519.

Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya mendorong kesetaraan gender. IKG merupakan indikator yang mengukur disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi ekonomi. Capaian positif ini tidak terlepas dari peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, membaiknya layanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan reproduksi, serta keterlibatan perempuan yang semakin besar dalam dunia kerja. Ketiga aspek tersebut menjadi determinan

utama dalam perbaikan skor IKG, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun capaian IKG yang menurun belum sepenuhnya mencerminkan terwujudnya kesetaraan gender yang bersifat substantif dan berjangka panjang. Ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan masih nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Hambatan struktural seperti dominasi norma patriarkal, rendahnya kepemilikan aset oleh perempuan, serta minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan ekonomi, tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pembangunan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif yakni melalui pendekatan pemberdayaan berbasis gender.

Salah satu bentuk strategi adalah pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan yang menjadi penopang utama rumah tangga, dengan cara memperkuat kapasitas produktif dan posisi tawar mereka dalam masyarakat. Pemberdayaan dalam konteks ini tidak dapat dipahami semata sebagai bantuan ekonomi, melainkan sebagai proses pembangunan partisipatif yang menjunjung nilai keberlanjutan dan kekuatan lokal. Chambers (1995) dalam Husna (2021) menyebutkan bahwa pemberdayaan berbasis masyarakat mengandung prinsip *people-centered*, *participatory*, dan *sustainable*.

Lebih lanjut, untuk menjamin bahwa setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memperoleh akses dan manfaat yang setara dari proses pembangunan, diperlukan integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan pembangunan yang responsif gender tidak hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hal ini dikarekan pemahaman terkait data gendee baik isu gender dan ketidaksetaraan gender masih rendah (Nurdin, 2022).

IDG merupakan indikator kunci yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia dengan memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana perempuan dapat menikmati hasil

pembangunan secara setara dengan laki-laki, serta menjadi cerminan dari keberhasilan kebijakan pembangunan dalam mengurangi ketimpangan gender . Dengan demikian, IDG tidak hanya menjadi alat ukur teknokratis, tetapi juga sarana strategis untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Rusli & Magna, 2023).

Dalam konteks pemberdayaan gender, peran IDG menjadi semakin strategis karena menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan posisi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Pemberdayaan gender tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan partisipasi perempuan, tetapi juga sebagai upaya transformasi struktural yang menjamin kesetaraan hak, akses, kontrol, dan manfaat atas hasil pembangunan. Melalui IDG, dimensi keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan strategis dapat diukur secara komprehensif, sehingga indeks ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menilai tingkat representasi dan partisipasi aktif perempuan dalam ruang publik (Alfana dkk., 2017).

Dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, kesetaraan gender merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2016), menegaskan bahwa pembangunan yang berperspektif gender bertujuan untuk menciptakan ruang partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan manusia dengan fokus pada pemberdayaan gender menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing (Setiani dkk., 2024). Tupamahu (2020), Pembangunan yang responsif gender bukan hanya menyangkut keadilan sosial, tetapi juga merupakan strategi penting untuk memperkuat daya saing nasional dan meningkatkan ketahanan pembangunan jangka panjang.

Oleh karena itu, pencapaian dan penguatan IDG menjadi instrumen penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki. Sejak diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995, IDG telah menjadi barometer global untuk menilai sejauh mana negara atau

wilayah berhasil mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan (Wisnujati, 2020).

Tabel 1.2
Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	61,36	63,26	65,92	69,03	67,20
Bengkayang	72,80	71,96	71,38	73,97	76,37
Landak	67,80	68,47	67,44	67,59	65,53
Mempawah	62,22	62,27	62,29	62,21	61,79
Sanggau	69,88	69,64	69,77	71,28	73,86
Ketapang	49,32	49,92	55,80	55,14	56,46
Sintang	63,55	63,67	63,97	63,74	63,70
Kapuas Hulu	62,52	63,08	63,13	64,05	63,76
Sekadau	56,27	57,60	57,40	57,25	57,74
Melawi	66,40	66,33	69,50	73,71	73,59
Kayong Utara	47,29	47,76	47,87	47,97	47,36
Kubu Raya	72,43	73,24	73,04	78,05	77,63
Kota Pontianak	66,48	66,18	66,23	68,44	66,99
Kota Singkawang	71,58	71,65	71,47	71,34	69,66
Kalimantan Barat	68,07	68,07	71,14	73,18	73,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang menunjukkan menunjukkan tren yang cenderung meningkat, dari angka 68,07 pada tahun 2019 menjadi 73,05 pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam partisipasi dan kontribusi perempuan terhadap pembangunan, meskipun secara spasial masih dijumpai ketimpangan antarwilayah yang cukup signifikan.

Pencapaian IDG tertinggi pada tahun 2023 diraih oleh Kabupaten Kubu Raya, yang mencatat angka 77,63. Capaian ini merefleksikan keberhasilan daerah tersebut dalam menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, baik di sektor ekonomi maupun pengambilan keputusan publik. Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Bengkayang yang secara konsisten mempertahankan IDG tinggi, dari 72,80 (2019) menjadi 76,37 (2023). Peningkatan ini patut dicermati sebagai hasil dari kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kesetaraan gender dan dukungan kelembagaan yang relatif lebih kuat.

Di sisi lain, sejumlah kabupaten masih menunjukkan angka IDG yang tergolong rendah. Kayong Utara, misalnya, dalam lima tahun terakhir tidak pernah melampaui angka 50, dengan IDG tahun 2023 berada pada posisi 47,36. Angka ini mengindikasikan keterbatasan signifikan dalam hal partisipasi perempuan, baik dalam dunia kerja, representasi politik, maupun dalam pengambilan keputusan strategis. Ketimpangan ini menjadi cerminan dari tantangan struktural yang dihadapi oleh perempuan di wilayah tersebut, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan layanan dasar lainnya.

Ketapang dan Sekadau juga tergolong sebagai daerah dengan IDG rendah, meskipun terdapat kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Ketapang, misalnya, mengalami peningkatan dari 49,32 pada 2019 menjadi 56,46 pada 2023, sementara Sekadau berada pada kisaran 57-an dalam lima tahun terakhir. Meskipun pergerakan positif ini patut diapresiasi, perlu diakui bahwa upaya pemberdayaan perempuan di daerah-daerah tersebut masih menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama berkaitan dengan norma sosial dan budaya yang masih membatasi peran perempuan di ranah publik.

Menarik untuk dicermati adalah tren di Kabupaten Melawi yang menunjukkan peningkatan signifikan, dari 66,33 pada 2020 menjadi 73,71 pada 2022. Capaian ini mengindikasikan adanya intervensi kebijakan yang relatif efektif, meskipun stagnasi pada tahun 2023 (73,59) menunjukkan perlunya evaluasi terhadap keberlanjutan program yang telah dijalankan. Sebaliknya, Kabupaten Landak mengalami tren penurunan, dari 68,47 pada 2020 menjadi 65,53 pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan gender di wilayah tersebut belum terlaksana secara konsisten atau mungkin menghadapi hambatan yang bersifat struktural maupun administratif.

Dari sudut pandang spasial, dapat dilihat bahwa daerah perkotaan seperti Kota Pontianak dan Kota Singkawang cenderung memiliki IDG yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingginya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja formal di wilayah perkotaan. Kota Pontianak mencatat IDG sebesar 66,99 pada tahun 2023, sementara Singkawang berada pada angka 69,66. Walaupun angkanya relatif

tinggi, fluktuasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga keberlanjutan pemberdayaan gender tetap relevan di wilayah perkotaan.

Secara keseluruhan, peningkatan IDG di tingkat provinsi tidak serta merta mencerminkan pencapaian yang merata di seluruh kabupaten/kota. Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara daerah dengan IDG tertinggi dan terendah, yang pada tahun 2023 mencapai selisih lebih dari 30 poin. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang kontekstual, berbasis data lokal, dan sensitif terhadap kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah. Selain itu, praktik-praktik baik yang telah berhasil diimplementasikan di daerah seperti Kubu Raya dan Bengkayang perlu didokumentasikan dan diikuti secara aktif di wilayah lain.

Untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kalimantan Barat, diperlukan strategi pembangunan yang terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menuntut integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik, serta perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak. Pendekatan yang bersifat holistik dan inklusif ini menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan gender, memperkuat peran serta posisi perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting karena berpotensi mempercepat peningkatan IDG melalui peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB umumnya berkorelasi positif dengan peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Kemampuan konsumsi masyarakat, yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita, menjadi indikator krusial untuk menilai kesejahteraan secara agregat maupun menurut kelompok tertentu, termasuk perempuan (Todaro & Smith, 2020).

Dalam konteks gender, pengeluaran per kapita perempuan dapat dijadikan sebagai proksi untuk menilai tingkat kesejahteraan kelompok perempuan secara

spesifik. Indikator ini juga dapat membantu mengidentifikasi kemiskinan berbasis gender, yang mencerminkan tidak hanya keterbatasan pendapatan, tetapi juga hambatan struktural dalam mengakses pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan dasar lainnya (Yacoub dkk., 2023). Kemiskinan perempuan cenderung bersifat multidimensional, ditandai dengan keterbelakangan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar gender (Khomsan dkk., 2015).

Lebih lanjut, dalam konteks pembangunan manusia, pengeluaran per kapita juga mencerminkan daya beli masyarakat atau *purchasing power parity* (PPP), yang menjadi salah satu komponen penting dalam mengukur capaian pembangunan wilayah (Muda dkk., 2019); (S. Dai dkk., 2023). Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah pemahaman yang komprehensif terhadap tingkat kesejahteraan perempuan di berbagai wilayah. Kenaikan pengeluaran per kapita, khususnya di kalangan perempuan, dapat mengindikasikan perbaikan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan dasar, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan IDG. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran per kapita perempuan tidak hanya menunjukkan kemajuan ekonomi, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang berkeadilan gender (Sukirno, 2013).

Berdasarkan Tabel 1.3, pengeluaran per kapita perempuan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menjadi indikator yang cukup representative dalam menggambarkan daya beli serta akses terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Data selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan pengeluaran per kapita perempuan secara umum, yang mencerminkan perbaikan relatif dalam kapasitas konsumsi dan ekonomi rumah tangga perempuan. Namun demikian, peningkatan ini tidak terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota, sehingga menimbulkan disparitas spasial yang cukup signifikan.

Kota Pontianak dan Kota Singkawang menempati posisi tertinggi dalam pengeluaran per kapita perempuan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2023, pengeluaran perempuan di Kota Pontianak tercatat sebesar Rp14.871 ribu, diikuti Kota Singkawang sebesar Rp10.414 ribu, jauh melampaui rata-rata provinsi yang berada pada angka Rp6.689 ribu. Sebaliknya, sejumlah kabupaten seperti Melawi,

Sekadau, dan Sanggau menunjukkan angka yang relatif rendah, bahkan belum mencapai Rp4.850 ribu pada tahun yang sama. Ketimpangan ini mengindikasikan perbedaan yang cukup tajam dalam tingkat kesejahteraan ekonomi perempuan antarwilayah, yang erat kaitannya dengan disparitas pembangunan infrastruktur, kesempatan kerja, serta kualitas layanan publik yang tersedia.

Tabel 1.3
Pengeluaran Per Kapita Perempuan
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	7.112	7.055	7.039	7.483	7.756
Bengkayang	4.781	4.738	4.770	4.910	5.114
Landak	5.644	5.598	5.657	6.059	6.250
Mempawah	5.927	5.825	5.780	5.989	6.290
Sanggau	4.457	4.348	4.400	4.649	4.848
Ketapang	6.925	6.889	6.914	7.067	7.335
Sintang	5.951	5.868	5.846	5.938	6.090
Kapuas Hulu	4.961	4.924	4.935	5.287	5.562
Sekadau	4.494	4.385	4.409	4.478	4.732
Melawi	4.293	4.159	4.239	4.457	4.630
Kayong Utara	5.538	5.474	5.541	5.752	5.965
Kubu Raya	5.405	5.377	5.298	5.621	5.876
Kota Pontianak	13.886	13.814	13.938	14.429	14.871
Kota Singkawang	9.932	9.803	9.880	10.138	10.414
Kalimantan Barat	6.256	6.134	6.165	6.417	6.689

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Lebih lanjut, perbedaan tersebut juga mencerminkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi di wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil atau memiliki keterbatasan struktural. Meskipun beberapa kabupaten seperti Landak, Mempawah, dan Kayong Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, wilayah-wilayah lain seperti Bengkayang, Sintang, dan Kubu Raya memperlihatkan pola yang fluktuatif, yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan yang setara gender.

Dalam konteks pembangunan yang berkeadilan, pengeluaran per kapita perempuan tidak hanya mencerminkan tingkat kesejahteraan material, tetapi juga menjadi indikator efektivitas kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu gender. Oleh karena itu, disparitas antardaerah yang tergambar dalam data

pengeluaran ini harus menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu mengintegrasikan pendekatan pembangunan yang peka gender, antara lain melalui optimalisasi program pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, serta penyediaan layanan dasar yang inklusif dan terjangkau. Langkah-langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita perempuan tidak semata-mata menjadi indikator statistik, melainkan benar-benar merepresentasikan kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif di Kalimantan Barat.

Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan dan bentuk-bentuk ketimpangan yang terjadi, perlu dilakukan telaah mendalam terhadap indikator-indikator penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG), khususnya dimensi status ekonomi yang merefleksikan tingkat partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi formal. Permasalahan ketimpangan gender yang tercermin melalui IKG dapat dianalisis lebih lanjut dengan mengevaluasi komponen-komponen penyusunnya (Septiawan & Wijaya, 2021). Salah satu dimensi penting dalam IKG adalah status ekonomi, yang diukur melalui partisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakah salah satu isu penting dalam perekonomian, hal ini disebabkan karena tenaga kerja adalah salah satu faktor utama dalam mendorong keberhasilan ekonomi suatu wilayah (Izzah & Budiantara, 2020). BPS (2023), status ekonomi ini ditunjukkan melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kelamin. Peran laki-laki sebagai tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah sangat besar dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Murialti dkk., 2022).

Keterlibatan laki-laki yang mayoritas dalam pekerjaan domestik dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki. *International Labour Organization* (ILO) merumuskan bahwa TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan terhadap populasi penduduk usia kerja.

TPAK menghitung jumlah penduduk dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja (World Bank, 2018).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (TPAKL) mencerminkan proporsi laki-laki yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, dan menjadi indikator penting dalam memahami dinamika produktivitas, pembangunan ekonomi, serta kemajuan dalam pencapaian kesetaraan gender (Cubas (2016); Verme (2015); Cascio dkk. (2015)). Sejak dekade 1960-an, berbagai negara menunjukkan tren peningkatan TPAKL yang cukup signifikan (Ma, 2014). Di Indonesia, meskipun mengalami fluktuasi, tren peningkatan TPAKL selama 15 tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan yang positif. Verick (2014), TPAKL tidak hanya merupakan indikator hasil pembangunan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan itu sendiri.

Tabel 1.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Persen)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	84,89	85,91	85,46	86,32	85,55
Bengkayang	86,28	87,25	82,69	85,23	86,12
Landak	80,92	84,09	81,83	84,53	84,2
Mempawah	81,18	80,17	80,4	82,36	85,05
Sanggau	85,93	86,07	84,24	87,78	86,68
Ketapang	85,21	82,99	83,75	84,29	83,54
Sintang	84,21	85,45	88,03	84,55	87,06
Kapuas Hulu	84,30	86,06	85,97	87,53	83,19
Sekadau	89,28	89,14	85,05	87,06	88,58
Melawi	87,52	86,45	86,76	88,15	87,42
Kayong Utara	82,36	83,57	84,19	87,77	86,83
Kubu Raya	81,98	83,57	83,53	81,94	84,05
Kota Pontianak	77,54	75,66	76,43	83,79	81,31
Kota Singkawang	79,95	77,02	78,49	84,52	84,04
Kalimantan Barat	83,24	83,35	83,05	85,01	84,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki di Provinsi Kalimantan Barat relatif stabil pada periode 2019-2021, yakni sebesar 83,24 persen pada 2019, 83,35 persen pada 2020, dan 83,05 persen pada 2021. Pada 2022 terjadi peningkatan signifikan menjadi

85,01 persen, yang kemudian sedikit menurun menjadi 84,85 persen pada 2023. Penyebaran antar kabupaten/kota cenderung menyempit, terlihat dari penurunan deviasi standar dari 3,83 poin persentase pada 2020 menjadi 1,98 poin persentase pada 2023, serta penurunan rentang maksimum-minimum dari 13,48 poin persentase menjadi 7,27 poin persentase pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan terjadinya konvergensi antarwilayah, di mana daerah dengan TPAK rendah pada awal periode cenderung mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan daerah dengan TPAK awal tinggi, dengan korelasi antara level awal dan kenaikan 2019-2023 sebesar -0,79.

Perubahan tahunan menunjukkan dinamika yang bervariasi. Pada 2020, meskipun terjadi pandemi COVID-19, rata-rata TPAK kabupaten/kota justru sedikit meningkat (+0,13 poin persentase), meskipun beberapa daerah mengalami penurunan tajam seperti Kota Singkawang (-2,93), Kota Pontianak (-1,88), dan Ketapang (-2,22). Sebaliknya, Landak (+3,17) dan Kapuas Hulu (+1,76) mencatat kenaikan terbesar. Tahun 2021 ditandai penurunan rata-rata (-0,47 poin persentase), dengan penurunan terdalam di Bengkayang (-4,56) dan Sekadau (-4,09). Tahun 2022 menjadi fase pemulihan kuat, rata-rata meningkat +2,07 poin persentase, didorong lonjakan di Kota Pontianak (+7,36) dan Kota Singkawang (+6,03) sebagai efek rebound sektor jasa perkotaan. Namun, pada 2023, laju kenaikan melambat dan rata-rata sedikit menurun (-0,16 poin persentase), dengan hanya lima daerah mengalami kenaikan sementara sembilan daerah lainnya menurun.

Peringkat TPAK laki-laki tahun 2023 menunjukkan Sekadau sebagai daerah tertinggi (88,58 persen), diikuti Melawi (87,42 persen), Sintang (87,06 persen), Kayong Utara (86,83 persen), dan Sanggau (86,68 persen). Di sisi lain, Kota Pontianak menempati posisi terendah (81,31 persen), disusul Kapuas Hulu (83,19 persen), Ketapang (83,54 persen), Kota Singkawang (84,04 persen), dan Kubu Raya (84,05 persen). Kesenjangan antara nilai tertinggi dan terendah pada 2023 adalah 7,27 poin persentase. Dilihat dari perubahan 2019-2023, lima daerah dengan peningkatan terbesar adalah Kayong Utara (+4,47), Kota Singkawang (+4,09), Mempawah (+3,87), Kota Pontianak (+3,77), dan Landak (+3,28). Sebaliknya, penurunan terjadi di Ketapang (-1,67), Kapuas Hulu (-1,11), Sekadau (-0,70), Bengkayang (-0,16), dan Melawi (-0,10). Dari sisi stabilitas, Kota Pontianak (3,47),

Kota Singkawang (3,34), dan Kayong Utara (2,27) memiliki volatilitas tertinggi (deviasi standar 2019-2023), sedangkan Sambas (0,53), Melawi (0,67), dan Ketapang (0,84) tergolong paling stabil.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Melawi selalu berada di atas rata-rata dalam lima tahun terakhir, sementara Kota Pontianak dan Kota Singkawang selalu berada di bawah. Pada 2023, delapan daerah memiliki TPAK ≥85 persen, tiga di antaranya ≥87 persen.

Secara substantif, pola ini mengindikasikan terjadinya konvergensi pasca-pandemi, di mana daerah perkotaan dengan TPAK awal rendah seperti Kota Pontianak dan Kota Singkawang menunjukkan peningkatan signifikan pada periode pemulihan 2022, meski tetap berada di bawah rata-rata provinsi pada 2023. Kabupaten dengan basis ekonomi agraris seperti Sambas, Sanggau, Melawi, dan Sekadau mampu mempertahankan posisinya di atas rata-rata provinsi dengan volatilitas relatif rendah, mencerminkan basis lapangan kerja laki-laki yang lebih stabil di sektor pertanian, perkebunan, dan manufaktur dasar. Sebaliknya, penurunan signifikan di Kapuas Hulu pada 2023 (-4,34) perlu mendapat perhatian khusus, mengingat penurunan tajam dalam satu tahun berpotensi terkait dengan faktor musiman, perubahan struktur pekerjaan, atau gangguan pada sektor ekonomi utama.

Dari sudut pandang kebijakan, diperlukan strategi yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Untuk kota seperti Pontianak dan Singkawang, fokus perlu diarahkan pada penguatan lapangan kerja formal di sektor jasa modern (logistik, ritel besar, *hospitality*, digital) dengan target kenaikan TPAK minimal 1 poin persentase per tahun. Bagi daerah rebound seperti Kayong Utara, Mempawah, dan Landak, perlu fokus pada peningkatan kualitas pekerjaan dan pengurangan pekerja setengah menganggur. Sementara itu, daerah yang mengalami penurunan seperti Ketapang dan Kapuas Hulu membutuhkan intervensi cepat melalui bursa kerja, proyek padat karya, dan pelatihan ulang keterampilan kerja, dengan target penempatan kerja minimal 60 persen dari peserta pelatihan setiap tahun.

Secara umum, data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (TPAKL) di Kalimantan Barat menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah yang cukup mencolok. Fenomena menarik terlihat pada wilayah pedalaman, yang justru

mencatat tingkat partisipasi laki-laki dalam pasar tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmatif yang tidak hanya menargetkan penciptaan lapangan kerja yang ramah gender, tetapi juga memperkuat dukungan struktural melalui penyediaan layanan pendukung seperti pelatihan keterampilan, fasilitas penitipan anak, serta peningkatan kesadaran gender di lingkungan kerja. Di sisi lain, keputusan laki-laki untuk bekerja sering kali juga dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti tanggung jawab pengasuhan anak dan tekanan ekonomi keluarga (Schaner & Das, 2016).

Meskipun secara agregat Kalimantan Barat menunjukkan kecenderungan positif dalam menurunkan ketimpangan gender selama beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan struktural masih menjadi hambatan yang nyata. Laki-laki memang mulai menunjukkan kiprah yang semakin signifikan. Namun, norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam keluarga dan masyarakat masih cukup mengakar kuat. Persepsi yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan ini tercermin dalam tingkat pendidikan yang cenderung lebih tinggi di kalangan laki-laki serta masih rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi formal (Nursaptini dkk., 2020). Ketimpangan ini tidak hanya menjadi cermin dari ketidakadilan sosial, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Gejala tersebut mengindikasikan adanya pergeseran norma dan struktur sosial ke arah yang lebih setara, namun perubahan tersebut belum bersifat merata dan substansial. Ketimpangan gender tetap memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembangunan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, yang sejauh ini masih memperlihatkan kesenjangan hasil antara laki-laki dan perempuan (Bertay dkk., 2021). Norma budaya patriarkal yang mengonstruksi perempuan sebagai penanggung jawab utama dalam urusan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pelayanan domestik masih kuat diyakini sebagian masyarakat, sehingga memperkuat reproduksi ketimpangan dalam kehidupan sehari-hari (Aeni, 2021). Dengan demikian, meskipun indikator pembangunan menunjukkan perbaikan, realitas sosial masih memperlihatkan ketimpangan yang berlapis dan kompleks.

Oleh sebab itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak cukup hanya dengan membuka akses partisipasi, tetapi memerlukan pendekatan transformatif yang menyasar pada kualitas pemberdayaan, posisi tawar, serta kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks ini, kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi perempuan menjadi kunci penting dalam mendorong perubahan yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara empiris pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pengeluaran Per Kapita Perempuan (PPP), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (TPAKL) terhadap Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2019-2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui regresi data panel lintas kabupaten/kota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Ketimpangan gender masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berbagai kebijakan telah diluncurkan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan memastikan kesetaraan akses terhadap sumber daya, namun disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi, dan politik masih tampak nyata. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berperan sebagai indikator utama untuk mengukur sejauh mana kesenjangan tersebut terjadi.

Dalam konteks ini, sejumlah faktor seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), pengeluaran per kapita perempuan, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (TPAKL) diyakini memiliki keterkaitan erat dengan tingkat ketimpangan gender. Tingginya atau rendahnya partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja dapat memengaruhi proporsi kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan pada akhirnya memperlebar atau mempersempit jarak ketimpangan gender. Namun demikian,

kajian empiris yang secara khusus menganalisis pengaruh IDG, pengeluaran per kapita perempuan, dan TPAKL terhadap IKG di Kalimantan Barat masih terbatas.

Pemahaman yang komprenshif mengenai hubungan antarindikator tersebut sangat penting sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan responsive terhadap isu kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh IDG, pengeluaran per kapita perempuan, dan TPAKL terhadap Indeks Ketimpangan Gender di Kalimantan Barat.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh terhadap Indeks Ketimpangan Gender di Kalimantan Barat?
2. Apakah Pengeluaran Perkapita Perempuan berpengaruh terhadap Indeks Ketimpangan Gender di Kalimantan Barat?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki berpengaruh terhadap Indeks Ketimpangan Gender di Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan mendeskripsikan Indeks Pemberdayaan Gender mempengaruhi Indeks Ketimpangan Gender di Kalimantan Barat.
2. Menguji dan mendeskripsikan Pengeluaran Perkapita Perempuan mempengaruhi Indeks Ketimpangan Gender di Kalimantan Barat.
3. Menguji dan mendeskripsikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Lakis mempengaruhi Indeks Ketimpangan Gender di Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur tentang ketimpangan gender, dengan fokus pada pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), pengeluaran per kapita perempuan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (TPAKL) terhadap Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan gender di Kalimantan Barat, serta memperkaya teori-teori pemberdayaan gender dan pembangunan inklusif, yang penting untuk mendukung kebijakan yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender di tingkat daerah.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat atau para pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya bagi pemerintahan daerah temuan ini bisa menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan program yang mendukung upaya mengurangi ketimpangan gender dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.